

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi industri yang paling cepat berkembang dan salah satu sektor unggulan perekonomian di dunia pada saat ini (Dwyer & Ray, 2010). Lebih dari 230 juta lapangan pekerjaan dan potensi ratusan milyar dollar tersedia untuk semua negara di setiap kawasan. Di negara berkembang pariwisata menjadi generator dalam penyerapan tenaga kerja dan pemasukan bagi perekonomian negara (Rubin, 2002). Namun demikian, pengelolaan sektor pariwisata sempat menimbulkan permasalahan terkait hak pengelolaan serta penggunaan hasil dari kontribusi sektor pariwisata antara pemerintah daerah dan pusat.

Permasalahan tersebut dikarenakan adanya dua sudut pandang yang saling berlawanan dalam sistem manajemen pariwisata. Sistem tersebut diantaranya adalah sistem manajemen terpusat yang mendukung adanya gagasan bahwa semua sumber daya, informasi, kendali atas kebijakan berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan, sistem manajemen desentralisasi lebih menekankan kepada peran pemerintah lokal beserta aktor-aktor lokal (*stake holders*) dimana potensi pariwisata itu berada (Yuksel, 1998).

Pada perkembangannya sistem manajemen pariwisata terpusat banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan. Peran pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dirasakan kurang maksimal. Sehingga

pengelolaan atas potensi pariwisata dengan menitikberatkan transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan.

Menurut Furqan & Mat Som (2010) menyatakan bahwa dalam konteks pariwisata, adanya desentralisasi dipandang sebagai alternatif strategi pembangunan daerah atau regional dalam pengelolaan potensi pariwisata secara efektif. Desentralisasi ditempatkan sebagai tanggung jawab baru pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata. Sebuah mekanisme yang lebih efektif akan terwujud dengan pengelolaan yang lebih independen, adanya kepemimpinan lokal, serta kerjasama yang baik dari *stakeholders* (pemerintah, komunitas pengusaha, kelompok tenaga kerja, dan sektor transportasi).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mendekatkan diri dengan rakyat. Dengan tujuan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara efektif dan efisien. Di lain pihak Usman (2001) menjelaskan bahwa pada kenyataannya sistem desentralisasi dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah kebijakan yang diskriminasi terhadap masyarakat yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah lebih mengutamakan putra daerahnya. Selain itu, berbagai macam jenis pajak dan pungutan akan digunakan pemerintah daerah dalam rangka mendorong pemasukan daerah yang sebesar-besarnya, karena dianggap lebih mudah dibandingkan dengan cara lainnya.

Pelaksanaan otonomi daerah sendiri di Indonesia resmi disetujui melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 yang selama ini dianggap tidak memberikan keleluasan terhadap

pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan semua kegiatan yang dilakukan di daerah harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Munculnya Undang-Undang otonomi daerah di Indonesia telah menjadikan daerah tingkat propinsi sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, kebijakan pengembangan Otonomi Pariwisata telah tercermin pada UU yang baru. Menurut Muwardi (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan Penjelasan umum, butir i, angka (5) bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom.

Dengan pelaksanaan otonomi bidang pariwisata diharapkan kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran sektor pariwisata sudah menjadi tugas dan wewenang pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi manajemen industri pariwisata ini akan mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak pemerintah. Hal tersebut juga mampu menunjukkan sebuah penyederhanaan dari sistem manajemen pariwisata, yang sebelumnya terjadi dualisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dimana, dualisme tersebut bagi kalangan pelaku industri pariwisata di daerah dianggap sebagai kendala dalam pengembangan usahanya.

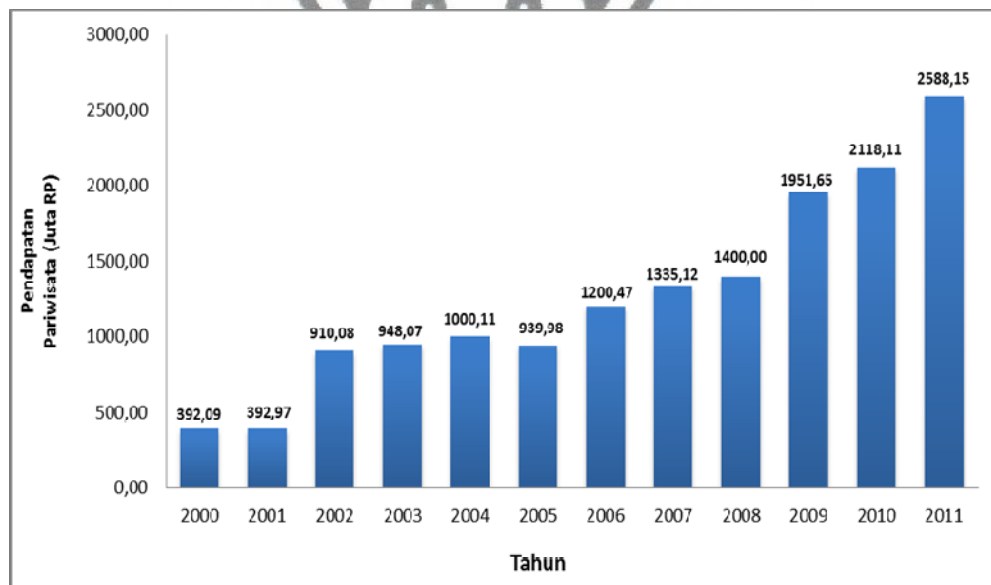
Kemampuan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya otonomi bidang pariwisata dapat dilihat pada kemampuan keuangan daerahnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah harus dimaksimalkan dengan baik dan optimal. Yang dimaksud dengan keuangan daerah disini adalah setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Fentika, 2005).

Dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah, sektor pariwisata pada saat ini memiliki peranan yang cukup penting. Kontribusi sektor pariwisata sendiri dapat dijelaskan sebagai iuran dari seseorang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan untuk diserahkan kepada badan atau perkumpulan tertentu (Gafur, 2003). Daerah yang memiliki potensi pariwisata cukup banyak, diharapkan juga akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di propinsi Jawa Timur, sektor pariwisata di Kabupaten Magetan menjadi salah satu sektor yang potensial dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Kabupaten Magetan memiliki obyek wisata yang relatif lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan,

dan obyek wisata budaya. Daya tarik wisata alam terdiri dari wisata tirta, hutan wisata, serta panorama alam, antara lain Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Puncak Lawu, Air Terjun Pundak Kiwo, Air Terjun Tirtosari, dan Bumi Perkemahan Mojosemi.

Obyek wisata budaya terdiri dari monumen, peninggalan purbakala, adat istiadat, makam, kesenian, antara lain Candi Reog, Candi Simbatan, dan Prasasti Watu Ongko. Obyek wisata buatan yang terdiri dari taman rekreasi, pemancingan, dan gelanggang renang, antara lain Taman Ria Manunggal dan Taman Ria Kosala Tirta. Selain itu, juga dikenalkan wisata ke lokasi industri, misalnya industri kerajinan kulit, kerajinan bambu, dan kerajinan gamelan. Potensi pariwisata yang cukup bervariasi tersebut mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Magetan. Lebih lanjut dapat dilihat pada realisasi pendapatan sektor pariwisata berikut ini.



Sumber : Dinas Pariwisata Magetan (diolah)

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2000-2011 (Juta Rp)

Pada gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Magetan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2000 yang merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan pariwisata di Magetan mencapai angka 392,97 juta rupiah. Dari periode tahun 2000 sampai dengan 2011 pendapatan pariwisata terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 22% per tahun. Pendapatan pariwisata tertinggi terjadi di tahun 2011 yang mencapai angka sebesar 2588,17 juta rupiah.

Sumber pendapatan pariwisata ini masih didominasi oleh obyek wisata Telaga Sarangan. Sedangkan untuk objek wisata lainnya masih relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan sektor pariwisata. Salah satu faktor pendorong peningkatan pendapatan pariwisata di Kabupaten Magetan adalah dibukanya jalan tembus yang menghubungkan Magetan dengan Karanganyar. Sehingga ikut berdampak kepada kemudahan akses transportasi untuk menuju obyek wisata sarangan. Selain itu, dengan dibukanya jalan tembus tersebut membuka peluang bagi wisatawan dari luar Jawa Timur mudah untuk mengakses obyek wisata Telaga Sarangan.

Sehingga sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sektor pariwisata di kabupaten Magetan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan analisis tentang perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang melakukan analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah selain melakukan analisis kontribusi sektor



pariwisata, juga akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan di sektor pariwisata itu sendiri.

Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2000 dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah. Hal ini didasarkan dengan pernyataan Yuksel (1998) dalam studinya bahwa dengan penerapan desentralisasi manajemen pariwisata akan berdampak positif terhadap kinerja industri pariwisata di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, judul yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah : “Analisis Kontribusi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah?
2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah ?
3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Magetan Pasca Otonomi Daerah

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai, antara lain :

1. Masukan dan informasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan dan dinas terkait dalam memajukan sektor pariwisata.
2. Sarana pengetahuan serta pemahaman mengenai perkembangan sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian Magetan.
3. Sarana informasi dan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata di Magetan.
4. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Magetan.